

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data yang diperoleh dari United Nations Department of Economic and Social Affairs: Population Division, pada 2022 Korea Selatan memiliki populasi penduduk sebesar 51.967.668 juta jiwa. Mayoritas penduduk di Korea Selatan (56.1%) tidak memiliki keyakinan terhadap Tuhan dan mayoritas penduduk lainnya (44%) memeluk agama Buddha, Kristen Protestan, dan Katolik Roma. Sedangkan agama Islam, Konfusius dan Cheondoisme termasuk dalam kategori agama lain dengan presentase penganut yang kecil. (Demy, 2019)

Dalam aspek ekonomi, Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat, salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah sektor pariwisata Korea Selatan. Sejak terjadinya demam K-Pop atau lebih sering dikenal dengan Korean Wave/Hallyu di era 2000-an awal, pariwisata di Korea Selatan mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Oh (2005) menemukan bahwa Hallyu mempengaruhi seseorang mengunjungi Korea. Dapat disimpulkan bahwa Korean Wave seperti drama TV Korea, lagu, film, dan pertunjukan memiliki pengaruh besar pada keputusan seseorang untuk melakukan perjalanan ke Korea. Yoo (2012) juga meneliti preferensi program pariwisata yang terkait dengan content gelombang Korea, dan terpilih sebagai program favorit papan nama penggemar bintang, pembuatan film drama, dan produk pertunjukan. Dalam studi Lee et al. (2006), jenis pariwisata yang terkait dengan Korean Wave seperti drama Korea, tur dengan bintang Hallyu, tamasya, konser, klub penggemar adalah faktor terpenting untuk memutuskan bepergian ke Korea.

Saat ini, pemerintah Korea Selatan melihat pasar muslim sebagai pasar yang sangat menguntungkan. Dengan bekerja sama dengan negara-negara muslim, mereka dapat memperoleh pemasukan yang sangat besar. Muslim Korea dapat menyesuaikan kebudayaan Islam dengan kehidupan di Korea Selatan karena komunitas Muslim di Korea Selatan berkembang dengan damai. Sebaliknya, populasi muslim diperkirakan akan mencapai 1,9 miliar pada tahun 2020, atau 24,9% dari populasi global. Pemerintah Korea Selatan melihat peluang besar untuk ekspor ke pasar muslim dan menarik wisatawan muslim ke Korea Selatan. Jumlah wisatawan muslim ke

Korea Selatan terus meningkat setiap tahun, dan ekspor makanan Korea menjadi sangat populer di negara muslim seperti Malaysia, Indonesia, UEA, dan Arab Saudi. (Deniar et al., 2019)

Pemerintah Korea Selatan membuat beberapa kebijakan untuk mendukung industri halal untuk meningkatkan pariwisata halal negara Korea Selatan. Salah satunya yaitu pembangunan tempat ibadah muslim di daerah yang ramai dengan wisatawan muslim dan juga penerbitan sertifikat makanan halal bagi tempat makan di Korea. (Korea Tourism Organization, 2019) Tetapi pada kenyataannya pengembangan industri halal di Korea Selatan ini menghadapi berbagai macam tantangan baik dari sosial maupun komunitas muslim di Korea itu sendiri. (Park & Mohamad Aizat Jamaludin, 2018)

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana respon masyarakat Korea terhadap implementasi kebijakan *halal tourism* pemerintah Korea Selatan?

1.3 Kerangka Pemikiran

Konsep Halal

Bagi seorang muslim, persoalan halal dan haram merupakan akidah yang harus ditaati dan diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup muslim telah menunjukkan berbagai penjelasan tentang apa-apa saja yang dihalalkan dan diharamkan bagi seorang muslim. Dalam rangka ketaatan kepada Allah SWT, pertanyaan tentang halal dan haram tersebar luas dan menjadi perhatian utama. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia harus diatur sesuai dengan aturan yang digariskan dalam Al-Qur'an dan hadis. (Husna, 2020)

Ayat 168 Surat Al-Baqarah adalah salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang membahas konsep halal:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik (tayyib) dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Seseorang yang beragama Islam harus memperhatikan sifat *ṭayyib* (baik atau tidaknya) makanan dan minuman serta konteksnya antara halal dan haram saat mereka mengonsumsinya. Dalam kehidupan sehari-hari, ditemukan bahwa konsumsi benda dan zat yang halal tidak dibenarkan untuk dikonsumsi dalam situasi yang tidak *ṭayyib*, seperti karena busuk, kadaluarsa, atau mengandung campuran dan zat berbahaya. Sebaliknya, ditemukan bahwa konsumsi benda dan zat yang halal dalam bentuk apa pun dianjurkan untuk dihindari. Dalam Islam, tidak dibenarkan untuk makan terlalu banyak, terburu-buru, atau tidak sesuai dengan kesehatan Anda. Oleh karena itu, pandangan Islam tentang konsumsi mencakup hal-hal yang halal dan haram serta *ṭayyib* (zat dan cara mengonsumsinya) (Ali, 2016).

Selain itu, karya ulama fikih terdahulu telah mempertimbangkan hubungan tematis antara lingkup hukum halal dan haram. Imam Al-Ghazali adalah salah satu ulama Islam pertama yang membahas tentang halal dan haram. Di dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, dia membahas berbagai aspek halal dan haram tentang ibadah dan akhlak, makanan dan minuman, pekerjaan dan usaha, perkawinan dan hubungan suami istri, puasa, jual beli, hiburan, dan permainan. (Sukiati, 2013)

Konsep Halal Industry

Di banyak negara di seluruh dunia, para pelaku industri melakukan banyak kampanye yang meningkatkan kesadaran konsumen tentang barang dan jasa halal, yang membuatnya menjadi kekuatan pasar Halal. Konsumen di seluruh dunia menjadi sadar akan pentingnya Halal tidak hanya untuk makanan tetapi juga untuk nilai-nilai etika seperti logistik, obat-obatan, perjalanan Muslim yang ramah (MFT), dan pakaian modis. Kebutuhan konsumen muslim yang meningkat saat ini adalah hasil dari bisnis halal bernilai triliunan dolar. (Azam & Abdullah, 2020)

Makanan halal berkualitas tinggi dan sehat adalah salah satu produk utama yang dijual oleh industri halal kepada pelanggan Islam dan non-muslim. Karena kesadaran konsumen akan standar halal, sertifikasi halal, dan bahan baku halal, permintaan makanan halal meningkat. Sekitar 56% dari pengeluaran Muslim di seluruh sektor gaya hidup dihabiskan di sektor makanan dan minuman (F&B), yang juga merupakan sektor terbesar. Pariwisata ramah muslim dan perjalanan halal adalah bidang baru yang sangat diminati dalam industri halal. Konsumen memiliki permintaan untuk makanan halal di maskapai dan hotel, maskapai penerbangan halal, hotel, pantai yang ramah Muslim, dan sebagainya. (Latif, 2017)

Menurut laporan dari Business Research Company (www.marketresearch.com) di dalam State of the Global Islamic Economy Report 2017–2018 produk kesehatan dan farmasi juga merupakan prospek pertumbuhan industri halal. Industri farmasi global, yang bernilai \$934.8 miliar pada tahun 2017 dan akan mencapai \$1170 miliar pada tahun 2021, tumbuh 5,8 persen, memiliki peluang besar untuk masuk.

Teori Sistem Politik

Dalam ilmu politik, pendekatan analisis sistem politik termasuk dalam kategori pendekatan tingkah laku. Gagasan pokok pendekatan tingkah laku adalah penekanan analisis pada tingkah laku manusia (atau masyarakat) sehingga berbeda dengan pendekatan kelembagaan sebagai pendahulunya yang menekankan lembaga sebagai unit analisis dalam sistem politik.

Menurut Easton minimal ada tiga hal mendasar yang harus diperhatikan dalam membahas sistem politik (Easton, 1992: 181-184). Pertama, sistem ditandai dengan adanya saling ketergantungan antarunit yang berada di dalamnya sehingga hal ini menunjukkan adanya koherensi. Kedua, sistem haruslah bersifat netral atau bebas dari pengaruh ideologi. Ketiga, sistem mengacu pada dua hal, co-variance dan ketergantungan antarunit yang membangun sistem. Perubahan salah satu unit dalam sistem akan mempengaruhi unit yang lain dalam sebuah sistem.

Easton lebih lanjut menjelaskan bahwa yang membedakan sistem politik dengan sistem yang lain adalah definisi politik itu sendiri. Politik adalah perjuangan individu atau kelompok dalam menguasai nilai-nilai sosial. Oleh karena itu, dalam sistem politik terdapat prinsip alokasi nilai-nilai sosial (the authoritative allocation of social value). Namun, perbedaan sistem politik dengan sistem yang lain tidak lantas membentuk jurang pemisah. Sebuah sistem dapat menjadi input bagi sistem yang lain, dan sebaliknya (Easton, 1992).

Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem politik secara umum adalah input, konversi (proses), output, feedback, dan lingkungan (Easton, 1992).

Gambar 1 Skema Kerja Sisten Politik menurut David Easton



Sumber: (Easton, 1992)

Gambar di atas menunjukkan cara sistem politik dapat berfungsi. Input selalu membentuk dan menerapkan kebijakan pemerintah. Input ini berasal dari respons masyarakat, yang dapat berupa tuntutan, atau dukungan, yang biasanya sesuai dengan kebijakan yang berlaku, dan tuntutan yang seringkali sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak, termasuk penolakan, apatis, dll. Respons ini kemudian dilanjutkan dengan konversi untuk diakhiri menjadi output, yaitu keputusan atau kebijakan. Konversi ini seperti kotak hitam karena kebanyakan orang tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Ada umpan balik atau feedback melalui lingkungan yang mempengaruhi input setelah menjadi output. Menurut Easton, lingkungan adalah semua sistem, baik fisik maupun sosial, yang tidak termasuk dalam sistem politik. Ada dua jenis lingkungan: intrasocietal dan extrasocietal. Extrasocietal adalah bagian dari sistem politik dan merupakan bagian fungsional dari masyarakat internasional atau suprasistem. Intrasocietal mencakup tingkah laku, sikap, kepribadian, dan gagasan dari lingkungan ekonomi, budaya, dan struktur sosial. Dalam hal ini, intrasocietal merupakan segmen fungsional masyarakat. Sistem politik kadangkala dapat mengalami tekanan, seperti krisis ekonomi. Untuk mengatasi tekanan dan gangguan saat ini, sistem politik harus menjalankan variabel pentingnya. Variabel penting ini memberikan nilai kepada anggota sistem dan mengatur bagaimana nilai tersebut diterima oleh sebagian besar anggota.

Dukungan diperlukan untuk menjaga kelangsungan setiap sistem politik. Indikator dukungan ini dapat diukur dengan cara bertanya pada setiap anggota kelompok tentang orientasi apa yang lebih dipilih: bekerja sama menyelesaikan masalah secara damai sehubungan tuntutan-tuntutan mereka yang saling berbeda atau sebaliknya. Dukungan dalam sistem politik juga mampu membantu memberikan sumber tenaga untuk tetap bekerjanya sistem tersebut. Dengan demikian, sistem politik merupakan keseluruhan proses di mana input diolah menjadi output yang proses pengolahannya dipengaruhi oleh lingkungan, serta berbagai institusi pemerintah.

Lebih lanjut Easton (Easton, 1992: 189) mengategorikan analisis sistem politik menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

1. Interaksi politik dalam masyarakat membentuk sistem perilaku.
2. Sistem politik berada dalam lingkungan fisik, sosial, dan psikologi.
3. Sistem politik sifatnya terbuka, artinya saling mempengaruhi dan dipengaruhi sistem lain melalui kebijaksanaan yang dihasilkan.
4. Berkaitan dengan pengaruh dari lingkungan, sistem politik harus memiliki keterampilan untuk merespons ancaman dan gangguan yang datang serta beradaptasi dalam segala kondisi.

Dalam kebijakan halal tourism yang diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan pun demikian, kebijakan halal tourism ini merupakan bagian dari sistem politik dimana pemerintah melihat fenomena meningkatnya angka wisatawan yang tinggi dan kebutuhan muslim yang harus dipenuhi di Korea Selatan. Setelahnya ketika kebijakan ini diterapkan masyarakat Korea kemudian memberikan respon dalam bentuk dukungan dan tuntutan. Input yang diberikan masyarakat ini dipengaruhi oleh lingkungan tempat kelompok masyarakat berada. Seperti masyarakat muslim di Korea yang mendukung kebijakan halal tourism di Korea untuk mengembangkan komunitas muslim di lingkungan mereka.

1.4 Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hipotesa yang diperoleh adalah: Dalam menyikapi kebijakan *Halal Tourism* yang diterapkan pemerintah Korea Selatan, masyarakat Korea merespon dengan positif yaitu berupa dukungan dan negatif berupa penolakan. Maka alasan masyarakat mendukung dan menolak kebijakan halal tourism adalah:

1. Kelompok masyarakat muslim di Korea mendukung kebijakan ini atas dasar keinginan mengembangkan komunitas muslim juga berdakwah;
2. Kelompok masyarakat lain (non-muslim) mendukung kebijakan *halal tourism* dikarenakan kepentingan bisnis dan usaha; dan
3. Kelompok masyarakat lain (non-muslim) yang menolak perkembangan kebijakan ini didasarkan pada pandangan negatif masyarakat terhadap islam.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari secara ilmiah tentang kesulitan yang dihadapi Korea Selatan dalam mengembangkan industri halal, menentukan rumusan masalah, membuktikan hipotesa, dan menerapkan teori dan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah untuk menjelaskan masalah.

1.6 Jangkauan Penelitian

Penulis menetapkan jangkauan penelitian ini pada kebijakan halal industry dan sistem sosial yang ada di Korea Selatan agar diskusi tidak melebar dari tema yang dimaksud.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Sebagaimana dinyatakan oleh John W. Creswell, penelitian kualitatif melibatkan penyelidikan dan pemahaman makna yang berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan (Bakry, 2016). Menurut Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (2009), penelitian kualitatif mencakup penelitian dan pengumpulan berbagai macam material empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi (pengalaman pribadi), introspektif, cerita hidup (cerita hidup), wawancara, observasi, sejarah, interaksi, dan teks visual yang menggambarkan peristiwa biasa dan menantang dalam hidup seseorang. Penulis juga menjelaskan subjek penelitian, yaitu unit analisis dan unit pengamatan, serta teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Selain data dari studi sebelumnya yang berkaitan, penelitian ini disusun melalui penelusuran literatur dan pustaka yang relevan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari situs web, halaman web resmi pemerintah Korea Selatan, koran elektronik, dan jurnal-jurnal yang relevan. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif.

1.8 Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membagi pembahasan penelitian menjadi empat bab sebagai berikut:

BAB I: berisi Pendahuluan yang terdiri dari delapan sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berfikir, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: dalam bab ini akan lebih mengeksplor latar belakang masalah pada bab sebelumnya. Dimana penulis akan menjelaskan tentang kebijakan halal tourism di Korea Selatan serta apa kepentingan diterapkannya kebijakan halal tourism di Korea Selatan.

BAB III: pada bab ini penulis akan memberikan analisa bagaimana respon yang muncul dari kebijakan halal tourism di Korea Selatan. Dimana penulis akan membahas mengenai apa saja penolakan/dukungan yang dihadapi Korea Selatan dalam mengembangkan Halal Industry dibantu dengan hipotesa yang sudah diajukan serta kerangka teori yang digunakan.

BAB IV: bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari berbagai temuan dalam analisa yang telah penulis lakukan selama penelitian untuk menjawab pertanyaan permasalahan yang diajukan.